



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Gresik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



BAPPEDA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031)3952812 Fax. (031)3952812
Laman : <http://bappeda.gresikkab.go.id> Pos el: bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K (61124)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 serta 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sesuai dengan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai prasyarat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Penyampaian laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Bappeda sekaligus sebagai media transparansi publik atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan target pembangunan daerah, serta mampu mendorong peningkatan capaian outcome secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan (*continuous improvement*) guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, berintegritas, dan responsif.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gresik, 25 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Gresik menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja pada periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Gresik. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Sasaran : Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja: Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah
2. Sasaran : Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif
Indikator Kinerja: Pertumbuhan capaian inovasi daerah

Dari rincian capaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran pertama dengan capaian 100,00% dan pada sasaran kedua dengan capaian 100,94%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sasaran : Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
Indikator Kinerja: Indeks Inovasi Daerah

Dari rincian capaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran pertama dengan capaian 100,00% dan pada sasaran kedua dengan capaian 105, 98%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik beserta dukungan segenap pejabat dan staf/ pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan juga karena koordinasi sinkronisasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

Adapun anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dari jumlah belanja sebesar Rp. 9.149.280.652,61 dialokasikan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.791.830.468,00 atau 85,16%.

Tingkat efisiensi untuk Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 9,42% dan Sasaran Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif sebesar 27,63% sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan dengan efisien dan maksimal dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB I

Pendahuluan

I. 1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah- langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Aksi Kinerja serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Pembangunan Satu tahun ke depan di harapkan Bappeda Kabupaten Gresik sudah beranjak pada tahapan perencanaan berbasis kinerja yang diawali dengan proses analisa terhadap kegiatan yang dilaksanakan melalui tahapan - tahapan berupa penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Tahapan dan Pengukuran Rencana Aksi Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran perencanaan yang berbasis kinerja tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan tersebut diatas sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/ keputusan dalam Program dan Kegiatan tahun berjalan dan acuan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran

I. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan
15. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

I. 3. Maksud dan Tujuan

☐ Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik didasarkan pada Permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi.

☐ Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah antara lain :

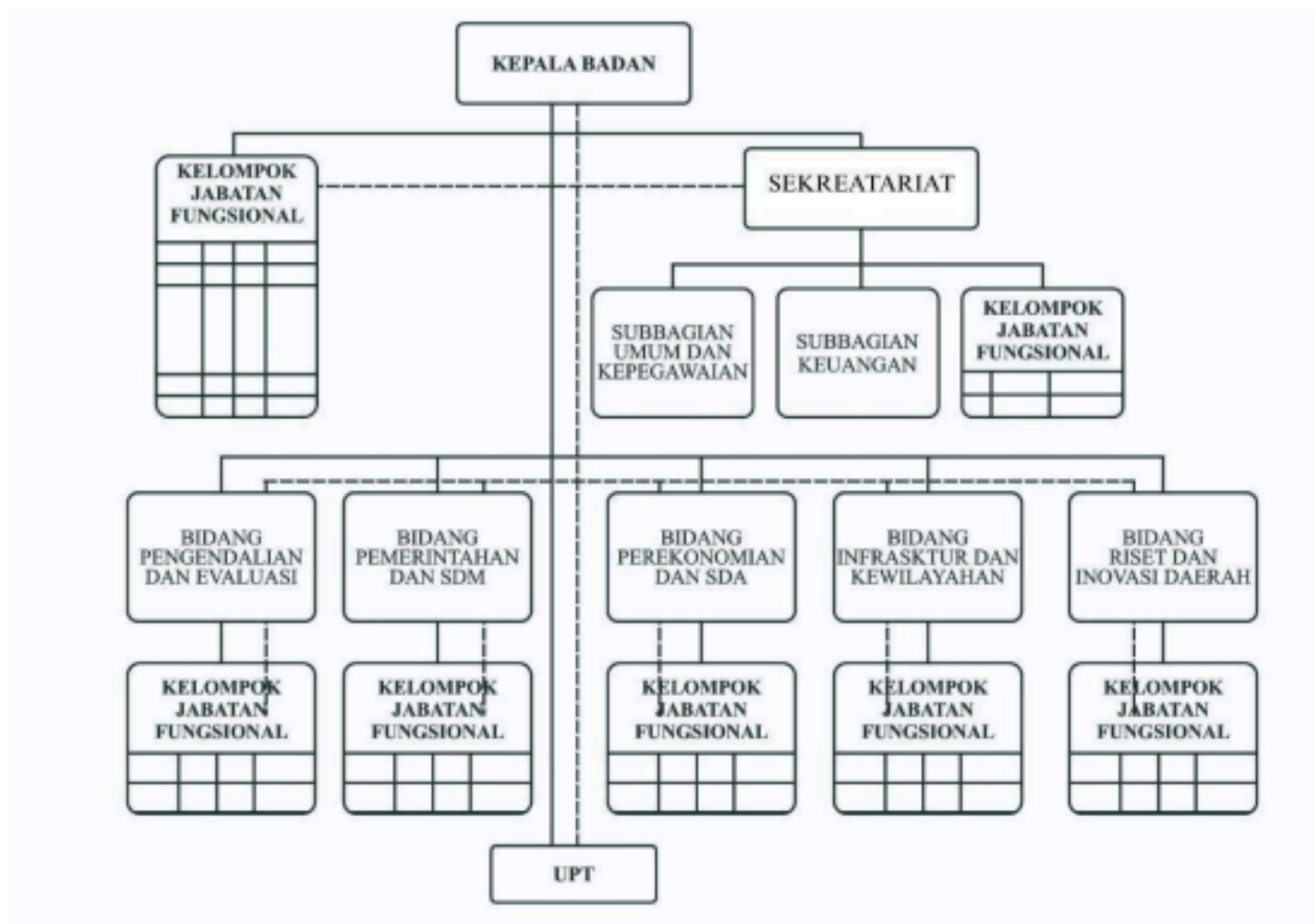
1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik (*feedback*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik.

I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah terkait dengan Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Riset dan inovasi daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga

Tugas dan Fungsi OPD

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

❖ Kepala Badan:

Tugas:

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
- d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah;
- k. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Sekretariat

Tugas:

memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- f. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- h. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**Tugas :**

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

❖ **Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

Tugas :

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan data perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;

- b. penyusunan perencanaan program data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;

- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;
- i. pengoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;
- k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Tugas :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

- h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; Bidang Perekonomian, Pendanaan dan Investasi;
- i. pengendalian, pemantauan, supervisi dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Tugas :

Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kebijakan perencanaan kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi prioritas sesuai RTRW daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

Tugas :

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan Riset dan Inovasi Daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

❖ **Subkoordinator**

Tugas :

Melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.

I. 6. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dengan Jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	STRUKTURAL	0	0	0	0	5	2	7
2	FUNGSIONAL	0	0	0	1	17	3	21
3	STAF ASN	0	0	3	4	20	0	27
4	STAF NON ASN	0	0	1	0	2	0	3
	JUMLAH	0	0	4	5	44	5	58

I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.2
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 (Post Ante) dan Tahun 2025 (On Going)

No.	Temuan Hasil Reviu	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Bukti Dukung
Surat Inspektur Nomor : 700/2307/437.72/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Perihal :Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 (Post Ante) dan Tahun 2025 (on Going) pada Perangkat Daerah di Irban Inspektorat Kabupaten Gresik				
1	Belum diformalkannya dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025 - 2029, DPPA TA 2025, Perjanjian	Melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025 - 2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja	Dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025 - 2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025

No.	Temuan Hasil Reviu	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Bukti Dukung
	Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025;	PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan	IKU TA 2025 telah diformalkan dan dapat diakses melalui tautan bukti dukung;	
2	Belum adanya tanggal penetapan dokumen Renja Tahun 2025	Melengkapi dokumen Renja Tahun 2025 dilengkapi dengan tanggal penetapan	Dokumen Renja Tahun 2025 telah dilengkapi dengan tanggal penetapan dan dapat diakses melalui tautan bukti dukung;	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025
3	Diharapkan memberikan konfirmasi terkait penentuan target pada indikator sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah karena tidak pada kenaikan target ada Tahun 2025 dan 2026	Memberikan konfirmasi terkait penentuan target pada indikator sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah karena tidak ada kenaikan target pada Tahun 2025 dan 2026	Terdapat kenaikan target Tahun 2025 dan 2026 pada indikator sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni 80.5 untuk Tahun 2025 dan 81 untuk Tahun 2026, sehingga terdapat kenaikan target sebesar 0,5.	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025
4	Belum diformalkannya dokumen dokumen dokumen Monev Renja;	Melengkapi dokumen dokumen Monev Renja didukung dengan dokumen yang telah diformalkan	Dokumen Monev Renja telah diformalkan dan dapat diakses melalui tautan bukti dukung;	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025
5	Belum adanya tanggal penetapan dokumen LKjIP Tahun 2024	Melengkapi dokumen LKjIP Tahun 2024 dilengkapi dengan tanggal penetapan	Dokumen LKjIP Tahun 2024 telah dilengkapi dengan tanggal penetapan dan dapat diakses melalui tautan bukti dukung;	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025
6	Diharapkan melakukan penyesuaian dokumen LKjIP dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Melakukan penyesuaian dokumen LKjIP dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menginformasikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Dokumen LKjIP telah disesuaikan dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan telah menginformasikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	https://bit.ly/TLHEAKIP20242025

No.	Temuan Hasil Reviu	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Bukti Dukung
7	Diharapkan melengkapi seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.	Melengkapi seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.	Dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya akan diformalkan	-

I. 8. Isu Strategis

Penelaahan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memperhatikan perumusan isu strategis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik

No	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA	Nawakarsa
	Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik		
1.	<i>Decarbonization</i>	Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi	Peningkatan integrasi data pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan adaptif terhadap krisis iklim.	Gresik Tuntas
2.	<i>Green Development</i>	Pencemaran Lingkungan			Optimalisasi tata ruang wilayah untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan	Gresik Mapan
3.	Migrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis GEDSI dan SDG's	Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui percepatan capaian SDGs di daerah	Gresik Seger
4.		Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif			Pengembangan strategi perekonomian inklusif daerah berbasis data	Gresik Tuntas, Gema Karya

No	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA	Nawakarsa
	Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik		
5.	Konflik internasional	Peningkatan Kesempatan Kerja		Penanggulangan Kemiskinan Kronis dan Kemandirian Multidimensi	Pemetaan kebutuhan masyarakat dan wilayah sebagai dasar penguatan strategi penanggulangan kemiskinan multidimensi	Gresik Seger
6.	Diversifikasi rantai suplai			Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Keunggulan Daerah dan Mitigasi Eksternalitas Industri Smelter	Penyelarasan kompetensi, kebutuhan industri, dan perencanaan pembangunan terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja daerah.	Gema Karya
7.	Aglomerasi	Meningkatkan Konektivitas		Keselarasan Pembangunan Wilayah didukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Penguatan perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi tata ruang, infrastruktur, dan konektivitas.	Gresik Mapan
8.		Pemerataan Pembangunan		Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal (<i>Village Demand Driven</i>) dan pengembangan Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya	Penguatan pembangunan desa berbasis sumber daya lokal	Gresik Mapan
9.	<i>Automation, Internet of Things (IoT), dan digitization</i>	Meningkatkan Inovasi Teknologi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Transformasi Digital dan Implementasi <i>Smart City</i>	Keselarasan inovasi dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Gresik Tuntas
10.	<i>Physical Internet</i>					
11.	Transformasi digital dan keterbukaan data	Implementasi Satu Data Indonesia dan integrasi data pembangunan	Digitalisasi layanan publik dan penguatan basis data pembangunan daerah	Kebutuhan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (<i>evidence-based planning</i>)	Penguatan implementasi Satu Data Daerah melalui penyediaan data yang berkualitas, terstandar dan dapat diintegrasikan secara terpadu.	Gresik Tuntas

No	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan				Isu Strategis BAPPEDA	Nawakarsa
	Global	Nasional	Jawa Timur	Gresik		
11.	Ekonomi sirkular	Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif	Integrasi kebijakan fiskal daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	Gema Karya
		Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional				

I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja, Sinkronisasi urusan untuk diakselerasi dengan sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025, selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.
2. Tahap Pengukuran Capaian Kinerja, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025.
3. Akuntabilitas Kinerja, dengan didukung data-data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan teknis kegiatan pada PD, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

I. 10. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Dasar Hukum
- I. 3. Maksud dan Tujuan
- I. 4. Struktur Kelembagaan dan Organisasi
- I. 5. Tugas dan Fungsi Lembaga
- I. 6. Sumber Daya Manusia
- I. 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- I. 8. Isu Strategis
- I. 9. Pola Penyusunan Laporan Kinerja dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- I. 10. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- II. 1. Perencanaan Strategis
- II. 2. Tujuan
- II. 3. Sasaran
- II. 4. Program
- II. 5. Rencana Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
- III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- III.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan Kinerja

II. 1. Perencanaan Strategis

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Pada RPJMD Tahun 2021-2026, Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota;

Misi ke-3

Mendorong kemandirian ekonomi yang seimbang antara sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun insan Gresik Unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat Gresik;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-1 yang berhubungan dengan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta

mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Sedangkan pada RPJMD Tahun 2026-2029 Kabupaten Gresik mengusung visi yaitu;

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2025-2029 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-2

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Misi ke-3

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

Misi ke-4

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;

Misi ke-5

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah Misi ke-4 yang berhubungan dengan Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.

II. 2. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13
2	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.750	4.000	4.320	4.780	5.000	5.200

Tabel 2.2
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4
		Indeks Pelayanan Publik	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51

II. 3. Sasaran

Pada Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 :

Tabel 2.3
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pembangunan Daerah						
2.	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	10% (37)	20% (45)	20% (54)	20% (83)	20% (100)	20% (120)

Tabel 2.4
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,71	55,79	56,88	58,00	59,13	60,29

II. 4. Program

Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disajikan sebagaimana Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	>81.26 % (Sangat Baik)	100%	100%	100%
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	45,00 (inovatif)	45,30 (inovatif)	45,50 (inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan	100%	100%	100%			

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)						
		Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%				
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan				100%	100%	100%
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral	95 %	85%	95%	100%	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD Terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Program Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra 2025-2030

No	Program	Indikator	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program	Indikator	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD Terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. 5. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik selaras dengan Perda RPJMD Kabupaten Gresik. Adapun Komitmen Kinerja Tahun 2025 Bappeda disajikan sebagai berikut:

1. Komitmen Kinerja Tahun 2025

Komitmen Kinerja Bappeda memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021- 2026; serta Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Komitmen Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,03
2.	Menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	5.000

Tabel 2.8
Komitmen Kinerja Tujuan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2025
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	80,90
		Indeks Pelayanan Publik	2,25

Tabel 2.9
Komitmen Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20% (100)

Tabel 2.10
Komitmen Kinerja Sasaran
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,50
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,71

Tabel 2.11
Komitmen Kinerja Program
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

No	Program	Indikator	TARGET 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	45,30 (inovatif)
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%

Tabel 2.12
Komitmen Kinerja Program
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Gresik Renstra 2025-2029

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	-
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
		Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
		Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD Terhadap RPJMD	100%

Tabel 2.13
Komitmen Kinerja Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.257.592.443,39
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	646.064.426,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	646.064.426,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.454.496.000,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	6.454.496.000,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	100%	1.008.407.872,39
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.970.400,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.073.700,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.940.400,00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	347.247.622,40
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	598.175.749,99
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	855.728.445,00

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.400.000,00
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	417.698.445,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	292.895.700,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	292.895.700,00
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	2.320.514.522,61
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.086.859.222,61
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	13.868.000,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3	2.072.991.222,61
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	22.089.800,00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1	22.089.800,00

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Daerah)		
5.01.02.2.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	91.820.500,00
5.01.02.2.01.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	91.820.500,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	119.745.000,00
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	119.745.000,00
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	4.138.463.350,00
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%	
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		1.006.110.350,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	15.901.303,43
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	22	322.610.000,00

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemerintahan		
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	447.007.571,93
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	220.591.474,64
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	631.906.700,00
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	211.302.000,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	223.455.200,00
5.01.03.2.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	197.149.500,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.500.446.300,00

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	913.087.900,00
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	90.539.200,00
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	653.435.000,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	194.384.200,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	649.000.000,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%	2.690.302.780,00
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	54,30 (inovatif)	
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1.062.874.600,00
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1.062.874.600,00

NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025	
			TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	302.874.600,00
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	302.874.600,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1.324.553.580,00
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	904.667.500,00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	419.886.080,00
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	0,00
TOTAL				18.406.873.096,00

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pengukuran ini dilaksanakan berdasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025. Untuk mempermudah interpretasi hasil pencapaian, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2014, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Capaian Kinerja > 100%	A
2	Capaian Kinerja = 100%	B
3	80% < Capaian Kinerja < 100%	C
4	50% < capaian kinerja < 80%	D
5	Capaian kinerja < 50%	E

Capaian indikator tujuan Bappeda Kabupaten Gresik ditunjukkan melalui Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan penelaahan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik, tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi, dengan target indikator yang meningkat secara bertahap hingga akhir periode perencanaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan Bappeda Tahun 2025-2030

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR						KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Penguatan Riset dan Inovasi	Nilai Akuntabilitas Institusi Pemerintah	80,62	80,9	81,2	81,5	81,8	82,1	82,4	82,1
	Indeks Pelayanan Publik	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,25

Indikator Tujuan Bappeda yang pertama adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 sampai dengan 2024 berturut turut mendapatkan predikat A.

Tabel 3.3
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024

TAHUN	NILAI SAKIP
2020	81,31
2021	80,86
2022	81,59
2023	81,93
2024	80,6
2025	80.6*

(*) Nilai SAKIP Tahun 2025 belum keluar, sehingga sementara menggunakan nilai Tahun 2024

Sumber: Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Hasil evaluasi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat Perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Rincian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,24
2	Pengukuran Kinerja	30	23,72
3	Pelaporan Kinerja	15	13,03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,61
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Selain itu, indikator tujuan lainnya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Target Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dari target Tahun 2025 sebesar 2,25, mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sangat baik.

Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Bappeda berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029 tersaji pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	20,29%	20,48%	100,94%	Sangat Tinggi

Dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026, capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan hasil yang optimal. Sasaran strategis Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah berhasil dicapai secara konsisten dengan realisasi indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100 persen pada Tahun 2025. Sementara itu, sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan capaian Pertumbuhan Inovasi Daerah sebesar 20,48 persen pada Tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya peran inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,50	80,50	100,00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,71	57,98	105,98%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026 secara konsisten tercapai sesuai dengan target di tahun 2025 yakni 100%. Sedangkan, sasaran strategis Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif dengan indikator Pertumbuhan Inovasi Daerah di tahun 2025 tercapai melebihi target dengan capaian 105,98%.

Berdasarkan capaian realisasi indikator sasaran Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik pada seluruh sasaran strategis Bappeda. Capaian tersebut digunakan sebagai dasar pendukung dalam menganalisis indikator-indikator pembangunan daerah. Selanjutnya disajikan data indikator pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Gresik, yang memiliki keterkaitan dan relevansi dalam memberikan gambaran komprehensif terhadap capaian pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan target RPJMD Tahun 2021–2026, kinerja pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada beberapa indikator utama. Diantaranya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ditargetkan sebesar 74,00 dan berhasil direalisasikan sebesar 89,71 pada Tahun 2024. Sedangkan, nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan. Capaian ini didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas layanan, peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Pada Tahun 2025, Indeks Williamson yang merepresentasikan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah ditargetkan sebesar 0,43. Penetapan target ini didasarkan pada hasil analisis tren perkembangan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir serta mempertimbangkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan di berbagai kecamatan. Proyeksi nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik berada pada kategori ketimpangan wilayah sedang, yang mengindikasikan masih terdapat perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah, namun dalam batas yang terkendali. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerataan pembangunan telah menunjukkan arah yang positif, meskipun tetap diperlukan penguatan intervensi kebijakan, khususnya pada wilayah dengan tingkat perkembangan relatif lebih rendah, guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Selain itu, Indeks Infrastruktur dan Indeks Konektivitas Wilayah merupakan indikator baru yang mulai dihitung oleh Bappeda dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Untuk Tahun 2025, target Indeks Infrastruktur ditetapkan sebesar 63,23, sedangkan Indeks Konektivitas Wilayah ditargetkan mencapai 0,745. Adapun realisasi kedua indeks tersebut masih dalam proses penyusunan.

Pengukuran capaian kinerja yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai konsistensi pencapaian target, mengidentifikasi tren peningkatan maupun penurunan kinerja, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disajikan dalam Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65	27,57	11,29	20,29	20,48	

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80,00	80,50	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,43	57,98	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif dan relatif konsisten selama periode Renstra. Pada sasaran strategis “Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah”, indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah tercatat mencapai 100% secara konsisten sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta mencerminkan kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Konsistensi capaian ini juga menegaskan efektivitas sistem perencanaan yang telah terbangun dengan baik.

Sementara itu, pada sasaran strategis “Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif”, indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah menunjukkan capaian yang fluktuatif selama periode

2021–2025. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan inovasi daerah telah berjalan, namun masih dipengaruhi oleh dinamika kapasitas perangkat daerah, keberlanjutan inovasi, serta tingkat partisipasi pemangku kepentingan.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3.8, pengukuran kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan baseline tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian pada seluruh indikator. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat dari 80,00 pada tahun 2024 menjadi 80,50 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah juga mengalami peningkatan dari 54,43 menjadi 57,98, menunjukkan adanya penguatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengukuran capaian kinerja yang dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik disajikan dalam Tabel 3.9 dan 3.10 berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	100%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	20,00	20,48	

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	82,50	80,50	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	59,13	57,98	

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja terhadap target akhir Renstra Tahun 2021–2026 pada Tabel 3.9 dan Renstra Tahun 2025–2029 pada Tabel 3.10, secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang positif dan berada pada jalur pencapaian target. Indikator Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai 100% pada tahun 2025, sesuai dengan target akhir Renstra, sehingga sasaran ini dinilai telah tercapai. Selanjutnya, indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah mencapai 20,48, telah melampaui target akhir Renstra sebesar 20,00, menunjukkan keberhasilan penguatan inovasi daerah. Sementara itu, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah masing-masing mencapai 80,50 dan 57,98, masih berada di bawah target akhir Renstra tahun 2026. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dan berada dalam kondisi on track, sehingga diperlukan penguatan dan percepatan pelaksanaan program agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, terkait tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029 dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional/Provinsi Jatim
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL	PROV. JATIM	PERANGKAT DAERAH	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	98,82%	100,00%	100,00%	
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	-	-	20,48 (100 inovasi)	

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional/Provinsi Jatim
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL	PROV. JATIM	PERANGKAT DAERAH	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	80,50	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	90,84	57,98	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja renstra pada tahun 2021-2026, Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat nasional mencapai 98,82%, sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 100,00%. Adapun capaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik juga telah mencapai 100,00%, sejajar dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gresik telah berada pada kondisi optimal, sehingga ke depan fokus pembangunan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi program dan kegiatan pembangunan serta penguatan inovasi daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan indikator Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tercatat sebesar 20,48. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Gresik telah mulai berjalan, namun masih memerlukan penguatan dan percepatan agar dapat mendekati capaian provinsi, khususnya melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, kualitas inovasi, serta penguatan sistem pendataan dan pelaporan inovasi daerah.

Pada Renstra Tahun 2025–2029, indikator yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik sebesar 80,50. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam rangka penyempurnaan kualitas dan konsistensi perencanaan, seiring dengan proses penyesuaian kebijakan dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Sedangkan, Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik tercatat sebesar 57,98, sementara data pada tingkat nasional belum

tersedia dan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai 90,84. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Gresik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar capaian inovasi daerah dapat terus meningkat dan selaras dengan arah kebijakan serta capaian di tingkat provinsi.

Sejalan dengan capaian Indeks Inovasi Daerah, upaya penguatan inovasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Daerah sebagai indikator kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 terealisasi sebesar 3,76, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,75. Faktor penunjang keberhasilan IDSD tersebut meliputi struktur ekonomi industri yang kuat dan terdiversifikasi tercermin pada Kabupaten Gresik yang memiliki basis industri manufaktur, petrokimia, semen, dan logistik yang matang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi pasar, produktivitas tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi. Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan berbasis data, serta sinergi lintas perangkat daerah turut mendukung efektivitas kebijakan peningkatan daya saing. Serta, dukungan infrastruktur dasar dan infrastruktur industri melalui ketersediaan infrastruktur energi, air industri, dan kawasan terintegrasi menjadi faktor penopang utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya tarik investasi. Jika dibandingkan dengan realisasi IDSD Provinsi Jawa Timur dengan nilai realisasi 3,91 Kabupaten Gresik masih berada dibawah Jawa Timur namun lebih tinggi dibandingkan realisasi Nasional dengan nilai realisasi sebesar 3,50.

Pada Tahun 2025, Pertumbuhan Inovasi Daerah telah melahirkan 100 Inovasi dan telah didaftarkan ke dalam *Innovative Government Award* dan meraih penghargaan peringkat ke-119 dari 415 Kabupaten di Indonesia oleh Kementrian Menteri Dalam Negeri dengan kategori inovatif.

Tabel 3.13
Daftar 100 Inovasi Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
1	Sistem Elektronik Pelayanan Kelitbangan dan iNovasi Daerah (SEPEKAN) (Fitur Kuota Magang & Monitoring Digital Magang)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan
2	Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil (SI-PANTAS)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian
3	E-ROOTS	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
4	SICENTING BERKISAH " ATASI DAN CEGAH STUNTING BERSAMA KITA BISAH"	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
5	LASKAR SEHATI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
6	GESIT P-5 SPENDALAS	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
7	KRINGAT WANGI BU RESTI (Kring Pengingat Waktu pendampingan ibu hamil RESTI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
8	Sistem Elektronik Logistik dan Peralatan Kebencanaan (SELOP)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
9	MEMAYU HAYUNING BAWANA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
10	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Penyedotan Kakus untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman dan Kontinyu (KAMPUNG PUDAK AYU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
11	Bantuan Untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak (BUNDA PUSPA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12	GERCEP DIGILING (Gerak Cepat Identitas Kependudukan Digital)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13	GEMA REMATING	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
14	SiAbDiS (Sistem Absensi Digital Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
15	TTM-an (Trotoar Tertib Masyarakat Nyaman)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
16	IBUNDA MANIS	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
17	SIPATU GT (Sistem Informasi Pariwisata Terpadu Gresik Tourism)	Inovasi pelayanan publik	pariwisata
18	KUDAKU TENAR (Aku Datang Alat Ukur Tepat dan Benar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	koperasi, usaha kecil, dan menengah
19	Aplikasi Digitalisasi Pembelajaran (SI DILAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
20	GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
21	Sistem Informasi Buku Tamu (SIBUKTA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	GALERI APIP	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
23	RUMAH INDADESA (Rumah Pelayanan kecamatan untuk Kerjasama Investasi Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa) di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
24	SIBESTIE (Sistem Informasi Berbasis Digital Terintegrasi) Berbasis Android	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
25	SEMPOL (Sistem Mobile Pelayanan PBB Online)	Inovasi pelayanan publik	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26	MAS DUDA RINDU BERAT (Masyarakat Dukung Periksa Dahak, Respek, Informasi dan edukasi Berantas TBC)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
27	Berliterasi Pesona dan Keajaiban Legenda Kebomas Melalui Mata Komik PENA (Platform Epik Novel dan Aneka cerita)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
28	SI CARI BERGIZI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
29	ForPeKa Gresik 2.0	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
30	Sekardadu (SElasi KegiatAn peRapihan kabel uDAra terpaDU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pekerjaan umum dan penataan ruang
31	SEMUT MERAH KERSO (Semangat Mengolah Sampah dengan Kerjasama antar Deso)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
32	CANTIK JELITA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
33	BLUE PRINT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
34	Service On Saturday di Kecamatan Kebomas (SOS MAS)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
35	SIAP KIR (Integrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor)	Inovasi pelayanan publik	perhubungan
36	JEBOL DIKLANTAS (PENGEMBANGAN) (Jemput Bola Rekam KTP untuk Peserta Didik, Lanjut Usia, Disabilitas dan Penerbitan KIA)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
37	JAMU PENAK MAS (Jam Untuk Pendidikan Anak dan Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan
38	SiNOPEL (Notifikasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Berbasis WhatsApp Gateway)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	penanaman modal
39	TAMAN BACA DIGITAL	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
40	GERCEP SATSET MAS (Gerakan Cepat Pengelolaan Satuan Tugas Sedia Setiap Saat Masalah Sampah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
41	Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam Website www.jdih.gresikkab.go.id untuk Pendayagunaan Informasi Produk Hukum di Kabupaten Gresik	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42	KEBUT LAGI	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
43	GREEN HOUSE	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
44	Operasi Penangkapan Ikan berbasis Teknologi (OPITEK)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kelautan dan perikanan
45	AQUDIG (Aquarium Digital)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perpustakaan
46	Pemanfaatan POC untuk Budidaya Tanaman mendukung urban farming (POCO'E DIUMBAR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pertanian
47	GRESIKERJA	Inovasi pelayanan publik	tenaga kerja
48	Sistem Perlindungan Masyarakat dengan Validasi Data SATLINMAS (SI PERMEN DASI)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
49	PANGKAH RUNNING	Inovasi pelayanan publik	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
50	SIKUe DeSi	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
51	BEKALKU (Permakanan Bagi Lansia Kurang Mampu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	sosial
52	PEPES PEDES (Pendidikan Pengelolaan Sampah untuk Peserta Didik Sd)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
53	Sistem informasi rEkomendasi PERijinan layanan Kelitbangan dengan digitAl sigNature (SEPEKAN) (Data Inovasi Daerah)	Inovasi pelayanan publik	Penelitian dan Pengembangan
54	GEMARZI (GERAKAN MASYARAKAT SADAR GIZI PEDULI STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
55	TOP LANTUS (LAYANAN TANPA PUTUS)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
56	GEREBEK PASAR PON	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
57	RATU PENSIL IMUT	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
58	GODOK	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
59	PINTER PTM	Inovasi pelayanan publik	kesehatan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
60	SINOPSIS (Sistem Informasi Poin Pelanggaran Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
61	Perpustakaan Digital 33 Gresik (PUSTAL 33 G)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
62	“WALI SOMAD BERSERBAN” Warung Balita Sehat: Optimalisasi Dana Berbasis Entrepreneur dari sharing bantuan CSR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	kesehatan
63	KENCENG KAWAL SPJ (Kecamatan Panceng Kawal SPJ)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
64	SIGAP-RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
65	Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa
66	PALING TAJIR LO	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
67	YOOK TILIK BAYI	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
68	MATGOMBES (CAMAT GOWES SAMBANG DESA)	Inovasi pelayanan publik	sosial
69	CETINGAN PAPA KEPO	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
70	POEDAK (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
71	LAPAK KURMA SI MAS (LAYANAN PEREKAMAN KUNJUNGAN RUMAH DAN SISWA MADRASAH ATAU SEKOLAH)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
72	GERDA CANVIK IVA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
73	JELITA TB	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
74	BESTHI (BEROBAT SEHAT SAHABAT TB-HIV)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
75	Jawara Papa Dedi Menusuk Hati	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
76	PEMBERDAYAAN SISWA TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI UPT SMPN 27 GRESIK. BERUPA KARYA MUSIK TRADISIONAL BERJUDUL "SANG JUANG"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
77	B_T DARING	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
78	AKSI PEMANTOLOGI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
79	SEPAKET (Sistem Pengambilan Keputusan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
80	GORENG CEKATAN (Gobyos Bareng dan Cek Kesehatan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
81	e-asmara	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	komunikasi dan informatika
82	SPENSEGRES SEHAT GESIT (UPT SMPN 11 GRESIK SEKOLAH SEHAT GENERASI HEBAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
83	Lontar Ceri (Layanan Online Kesesuaian Tata Ruang dengan Cepat,Efektif dan Terintegrasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pekerjaan umum dan penataan ruang
84	LADIKA (Laporan Digital Perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	pendidikan
85	PERSADIVA (PERempuan SAdar DIri akan IVA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
86	PKH INKLUSIF	Inovasi pelayanan publik	sosial
87	Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
88	JULIT KREASI (Jurnal Literasi & Kreatifitas Siswa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
89	IMPRIS (Implementasi Pembentukan Karakter islami Dengan Tahfidzul Qur'an)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
90	GF Metagabe (Pemetaan Gaya Belajar Melalui Google Form)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
91	Pembelajaran Difrensiasi _Diffrent For KeMaKre	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
92	MBAK JUM (Membuat Batik Jumputan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
93	Jalin Orientasi Sayang Siswa dan Silaturahmi bersama Masyarakat (JOSSMAS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
94	KANG RAMLI (Kampung Ramah Lingkungan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	lingkungan hidup
95	Barcode Masa Depan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pendidikan
96	SI DESI MLAKU KEBAT	Inovasi Pelayanan Publik	Kesehatan
97	IMPRIS (Implementasi Pembentukan Karakter islami Dengan Tahfidzul Qur'an)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	URUSAN UTAMA
98	META URC (PEMETAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNIT REAKSI CEPAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Tenaga Kerja
99	Edukasi Kesehatan Lingkungan Melalui Klinik Sanitasi (ES LILIN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kesehatan
100	DETAH KERIS (Deteksi, Tanggulasi, Kurangi Keluarga Risiko Stunting)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik beserta solusinya dapat dilihat pada tabel 3.14 dan 3.15 berikut:

Tabel 3.14
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100%	Prioritas pembangunan tahunan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif. 2. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala.	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Pemahaman perangkat daerah terhadap sistem perencanaan dan evaluasi kinerja cukup baik 2. Adanya pendampingan dan koordinasi yang intensif	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1. Ketepatan proses administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah 2. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai 2. Perencanaan kebutuhan yang tepat 3. Dukungan SDM administrasi yang kompeten 4. Pengelolaan administrasi yang tertib dan berkelanjutan.	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1. Proses pengadaan sesuai waktu yang direncanakan 2. Ketersediaan penyedia jasa yang memenuhi standar	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1. Perencanaan pemeliharaan yang terjadwal 2. Pengawasan dan evaluasi kondisi barang secara rutin.	-
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	Keselarsan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD belum sepenuhnya optimal akibat adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika prioritas pembangunan daerah dengan peralihan RPJMD yang baru.	1. Penguatan sinkronisasi perencanaan RKPd–RPJMD 2. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemutakhiran dokumen perencanaan secara berkala.
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Fasilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai karena perbedaan jadwal penyampaian dokumen dan keterbatasan kelengkapan data pendukung.	1. Penyeragaman jadwal penyusunan dokumen 2. Penguatan pendampingan teknis kepada perangkat daerah 3. Peningkatan kualitas dan kelengkapan data perencanaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Seluruh fasilitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana sesuai target dan mendukung proses perencanaan berbasis data.	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai perencanaan.	-
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Implementasi sistem informasi belum optimal sepenuhnya akibat kendala teknis aplikasi, keterbatasan integrasi sistem, dan adaptasi pengguna.	1. Peningkatan koordinasi dengan pengelola sistem 2. Penguatan kapasitas SDM pengguna 3. Optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem informasi pendukung.
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	1. Pelaksanaan tahapan perencanaan, keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta penguatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar sektor berjalan secara optimal. 2. Seluruh dokumen perencanaan tersusun sesuai standar kualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah.	-
			Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan koordinasi perencanaan berjalan efektif melalui forum lintas perangkat daerah sehingga kebijakan dan program bidang pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal sehingga program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Koordinasi perencanaan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan terintegrasi, selaras, dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.	-
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif		Pertumbuhan Inovasi Daerah	100,94%	Adanya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatnya partisipasi aparatur dan pemangku kepentingan, serta adanya fasilitasi dan pendampingan inovasi secara berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya inovasi yang relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	-
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%	Pelayanan kelitbangan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kualitas, maupun manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah serta mendukung pelayanan publik	-
			Capaian Indeks Inovasi Daerah	106,77%		
			Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentasi Fasilitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1. Dukungan kegiatan di bidang sosial dan kependudukan terlaksana sesuai target. 2. Hasil kegiatan membantu pemerintah memahami kondisi nyata masyarakat.	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	1. Hasil penelitian memberikan gambaran kondisi ekonomi dan pembangunan daerah yang jelas. 2. Dukungan terhadap penelitian ekonomi dan pembangunan sudah efektif dan memberi manfaat bagi daerah.	-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1. Hasil kelitbang memberikan kontribusi nyata bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi penelitian dan pengembangan berjalan lengkap, mulai dari penyusunan kajian sampai pemanfaatannya.	-

Tabel 3.15
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Prioritas pembangunan tahunan telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, serta terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD.	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1. Koordinasi antar perangkat daerah berjalan efektif. 2. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala.	-

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Pemahaman perangkat daerah terhadap sistem perencanaan dan evaluasi kinerja cukup baik Adanya pendampingan dan koordinasi yang intensif	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Ketepatan proses administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	100%	Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai Perencanaan kebutuhan yang tepat Dukungan SDM administrasi yang kompeten Pengelolaan administrasi yang tertib dan berkelanjutan.	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Proses pengadaan sesuai waktu yang direncanakan Ketersediaan penyedia jasa yang memenuhi standar	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Perencanaan pemeliharaan yang terjadwal Pengawasan dan evaluasi kondisi barang secara rutin.	-
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	Keselarasan program pembangunan RKPD terhadap RPJMD belum sepenuhnya optimal akibat adanya penyesuaian kebijakan dan dinamika prioritas pembangunan daerah dengan peralihan RPJMD yang baru.	Penguatan sinkronisasi perencanaan RKPD–RPJMD Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah Pemutakhiran dokumen perencanaan secara berkala.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Fasilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai karena perbedaan jadwal penyampaian dokumen dan keterbatasan kelengkapan data pendukung.	Penyeragaman jadwal penyusunan dokumen Penguatan pendampingan teknis kepada perangkat daerah Peningkatan kualitas dan kelengkapan data perencanaan.
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Seluruh fasilitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah telah terlaksana sesuai target dan mendukung proses perencanaan berbasis data.	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kegiatan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai perencanaan.	-
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Implementasi sistem informasi belum optimal sepenuhnya akibat kendala teknis aplikasi, keterbatasan integrasi sistem, dan adaptasi pengguna.	Peningkatan koordinasi dengan pengelola sistem Penguatan kapasitas SDM pengguna Optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem informasi pendukung.
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	Pelaksanaan tahapan perencanaan, keterpaduan kebijakan lintas sektor, serta penguatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar sektor berjalan secara optimal. Seluruh dokumen perencanaan tersusun sesuai standar kualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah.	-
			Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan koordinasi perencanaan berjalan efektif melalui forum lintas perangkat daerah sehingga kebijakan dan program bidang pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan optimal sehingga program dan kegiatan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Koordinasi perencanaan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan terintegrasi, selaras, dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.	-
2	Mendorong penguatan inovasi daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pertumbuhan Inovasi Daerah	100,94%	Adanya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatnya partisipasi aparatur dan pemangku kepentingan, serta adanya fasilitasi dan pendampingan inovasi secara berkelanjutan sehingga mendorong terciptanya inovasi yang relevan dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	-
			Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	100%	Pelayanan kelitbangan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kualitas, maupun manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah serta mendukung pelayanan publik	-
			Capaian Indeks Inovasi Daerah	106,77%		
			Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan	100%		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentasi Fasilitas Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1. Dukungan kegiatan di bidang sosial dan kependudukan terlaksana sesuai target. 2. Hasil kegiatan membantu pemerintah memahami kondisi nyata masyarakat.	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitas penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	1. Hasil penelitian memberikan gambaran kondisi ekonomi dan pembangunan daerah yang jelas. 2. Dukungan terhadap penelitian ekonomi dan pembangunan sudah efektif dan memberi manfaat bagi daerah.	-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1. Hasil kelitbangan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi penelitian dan pengembangan berjalan lengkap, mulai dari penyusunan kajian sampai pemanfaatannya.	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik beserta solusi mulai dari sasaran renstra, program, kegiatan sampai sub kegiatan yang terdiri dari 2 sasaran, 4 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Keselarasan perencanaan pembangunan daerah didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif, keterpaduan dokumen perencanaan dengan RPJMD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang konsisten. Beberapa capaian belum optimal akibat penyesuaian kebijakan, perbedaan jadwal penyusunan dokumen, keterbatasan data pendukung, serta kendala teknis sistem informasi. Sementara itu, penguatan inovasi daerah dan pelaksanaan kelitbangan berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya analisis efektifitas penggunaan sumber daya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik dapat ditinjau pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INSIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN	
1	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	15.716.570.316,00	14.236.217.341,12	90,58%	9,42%
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	20,29%	20,48%	100,94%	2.690.302.780,00	1.946.956.066,00	72,37%	27,63%

Tabel 3.17
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik Renstra Tahun 2025-2029

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,50	80,50	100%	15.716.570.316,00	14.236.217.341,12	90,58%	9,42%
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	54,71	57,98	100%	2.690.302.780,00	1.946.956.066,00	72,37%	27,63%

Berdasarkan kedua tabel di atas, efektivitas penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang konsisten antara periode 2021–2026 dan sasaran 2025–2029. Pada Renstra 2021–2026, sasaran Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah tercapai dengan realisasi PAPBD sebesar 90,58% dan tingkat efisiensinya sebesar 9,42%, sementara sasaran Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Inovatif dan Partisipatif tercatat 72,37 dengan tingkat efisiensinya sebesar 27,63%. Selaras dengan sasaran Renstra 2025–2029,

capaian Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 90,58 dengan tingkat efisiensinya sebesar 9,42% dan Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan daerah sebesar 72,37 dengan tingkat efisiensinya sebesar 27,63%, menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah diarahkan secara efektif untuk mendukung prioritas perencanaan dan inovasi daerah, meskipun penguatan inovasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Pada Urusan Penunjang meliputi Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Pada Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.716.570.316,00 realisasi sebesar Rp. 14.236.217.341,12 atau 9.42% tidak terserap sebesar Rp. 1.480.352.974,8 disebabkan karena efisiensi. Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan Melalui 1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.690.302.780,00 realisasi sebesar Rp.1.946.956.066,00 atau 27.63% atau tidak terserap sebesar Rp 743.346.714,00. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100%	9.257.592.443,39	100%	8.391.342.939,12	866.249.504,27
			5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	646.064.426,00	100%	417.822.138,00	228.242.288,00
			5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	646.064.426,00	3 Dokumen	417.822.138,00	228.242.288,00
			5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.454.496.000,00	100%	6.117.238.428,12	337.257.571,88
			5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	6.454.496.000,00	47 Orang/Bulan	6.117.238.428,12	337.257.571,88
			5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Perangkat Daerah	100%	1.008.407.872,39	100%	838.327.311,00	170.080.561,39
			5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.970.400,00	4 Paket	45.816.000,00	4.154.400,00
			5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11.073.700,00	5 Paket	11.050.000,00	23.700,00
			5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.940.400,00	3 Dokumen	1.800.000,00	140.400,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	347.247.622,40	20 Laporan	343.921.423,00	3.326.199,40
			5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	598.175.749,99	2 Dokumen	435.739.888,00	162.435.861,99
			5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	855.728.445,00	100%	730.167.183,00	125.561.262,00
			5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.400.000,00	3 Laporan	243.756,00	2.156.244,00
			5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	417.698.445,00	3 Laporan	352.697.347,00	65.001.098,00
			5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	435.630.000,00	4 Laporan	377.226.080,00	58.403.920,00
			5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	292.895.700,00	100%	287.787.879,00	5.107.821,00
			5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	292.895.700,00	16 Unit	287.787.879,00	5.107.821,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	2.320.514.522,61	100%	1.832.060.931,00	488.453.591,61
			5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.086.859.222,61	100%	1.676.976.709,00	409.882.513,61
			5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	13.868.000,00	2 Dokumen	7.315.000,00	6.553.000,00
			5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2.072.991.222,61	2 Dokumen	1.669.661.709,00	403.329.513,61
			5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	22.089.800,00	100%	19.513.500,00	2.576.300,00
			5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	22.089.800,00	2 Dokumen	19.513.500,00	2.576.300,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.01.02.2.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	91.820.500,00	100%	84.940.572,00	6.879.928,00
			5.01.02.2.01.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	91.820.500,00	4 Laporan	84.940.572,00	6.879.928,00
			5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	119.745.000,00	100%	50.630.150,00	69.114.850,00
			5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	119.745.000,00	4 Dokumen	50.630.150,00	69.114.850,00
			05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	4.138.463.350,00	100%	4.012.813.471,00	125.649.879,00
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%		
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%		

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
					Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		100%		
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		100%		
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%		100%		
					Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		
					Persentase Dokumen Renstra kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		
					Persentase dokumen Renja kualitas baik pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	100%	1.006.110.350,00	100%	994.127.770,00	11.982.580,00
			5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	15.901.303,43	2 Dokumen	15.901.200,00	103,43

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	322.610.000,00	2 Laporan	317.363.550,00	5.246.450,00
			5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	447.007.571,93	2 Dokumen	440.905.105,00	6.102.466,93
			5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	220.591.474,64	6 Laporan	219.957.915,00	633.559,64
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	631.906.700,00	100%	592.945.084,00	38.961.616,00
			5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	211.302.000,00	1 Dokumen	199.798.100,00	11.503.900,00
			5.01.03.2.02.0002	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	223.455.200,00	3 Laporan	199.142.100,00	24.313.100,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.01.03.2.02.0003	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	197.149.500,00	1 Dokumen	194.004.884,00	3.144.616,00
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100%	2.500.446.300,00	100%	2.425.740.617,00	74.705.683,00
			5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	913.087.900,00	2 Laporan	858.805.720,00	54.282.180,00
			5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	90.539.200,00	2 Laporan	87.792.790,00	2.746.410,00
			5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	3 Laporan	653.435.000,00	3 Laporan	647.471.226,00	5.963.774,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	194.384.200,00	2 Laporan	183.533.001,00	10.851.199,00
			5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	649.000.000,00	2 Laporan	648.137.880,00	862.120,00
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	5.05.02	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100%	2.690.302.780,00	100%	1.946.956.066,00	743.346.714,00
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentasi Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	1.062.874.600,00	100%	490.092.000,00	572.782.600,00
			5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1.062.874.600,00	1 Dokumen	490.092.000,00	572.782.600,00
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	302.874.600,00	100%	296.563.000,00	6.311.600,00
			5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	302.874.600,00	1 Dokumen	296.563.000,00	6.311.600,00

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NO. REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2025				
						TARGET	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA
			5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	100%	1.324.553.580,00	100%	1.160.301.066,00	164.252.514,00
			5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	904.667.500,00	1 Laporan	865.559.086,00	39.108.414,00
			5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	419.886.080,00	1 Laporan	294.741.980,00	125.144.100,00
			TOTAL				18.406.873.096,00		16.183.173.407,12	2.223.699.688,88

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik selama tahun 2025, baik dalam konteks pencapaian sasaran strategis maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Gresik pada dua sasaran strategis yang diukur melalui indikator pada periode Renstra 2021–2026 maupun Renstra 2025–2029 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian yang secara umum dapat dikategorikan sangat berhasil. Hasil ini menjadi dasar evaluasi yang penting untuk perbaikan, penguatan, dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

Dengan demikian, dokumen LKjIP ini diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai referensi bagi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta perencanaan program pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan Daerah	100 %
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	1	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	20,29 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9,495,033,237.31	APBD
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 3,823,254,000.00	APBD
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 4,629,705,650.00	APBD
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 2,316,770,414.00	APBD
Jumlah			Rp. 20,264,763,301.31	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

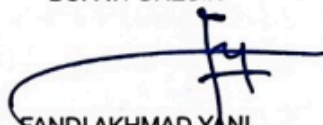
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

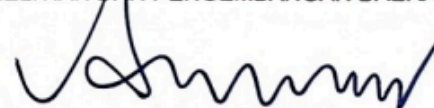
PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda

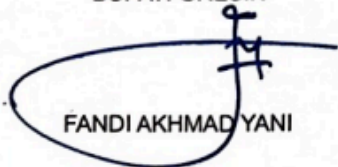
NIP. 19680503 199703 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80.5 Angka
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1	Indeks Inovasi Daerah	54.71 angka

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9,257,592,443.39	PAPBD
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2,320,514,522.61	PAPBD
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 4,138,463,350.00	PAPBD
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 2,690,302,780.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 18,406,873,096.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680503 199703 1 011